

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan KJPP bagi Bank Mandiri BBA Padang dalam kaitannya dengan pemberian kredit.

BBA Padang sebagai unit kerja dari Bank Mandiri yang bertugas untuk menyalurkan kredit di wilayah Sumatera Barat tentunya memiliki prosedur dalam hal memberikan kredit kepada masyarakat. Standar Prosedur Business Banking Edisi II Tahun 2012 merupakan dasar dari pihak BBA Padang untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Berdasarkan SPK tersebut dijelaskan bahwa dalam hal melakukan penilaian jaminan, harus dilakukan oleh penilai publik. Penilai publik yang digunakan oleh pihak BBA Padang harus KJPP yang sudah menjadi rekanan. Ketentuan inilah yang menjadi dasar KJPP melakukan penilaian jaminan untuk proses kredit di BBA Padang. Dalam hal ini pihak KJPP memberikan laporan penilaian kepada pihak BBA Padang untuk menjadi bahan pertimbangan nilai suatu jaminan kredit yang sifatnya objektif. Jadi peran dari KJPP dalam perkreditan BBA Padang adalah sebagai pemberi masukan nilai yang objektif terhadap suatu objek yang akan dijadikan jaminan kredit.

2. Tanggung jawab hukum KJPP terhadap hasil penilaiannya terkait jaminan yang digunakan dalam kredit pada BBA Padang.

Terkait pertanggung jawaban KJPP yang dalam hal ini bertindak sebagai appraisal dibagi dalam beberapa bentuk. Pertanggung jawaban pertama adalah pertanggung jawaban perdata, kedua adalah pertanggung jawaban pidana, dan yang terakhir adalah pertanggung jawaban administratif. Pertanggung jawaban perdata biasanya berbentuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pertanggung jawaban pidana biasanya berbentuk hukuman pidana, sedangkan pertanggung jawaban administrasi biasanya berbentuk peringatan, pembekuan izin perusahaan, dan yang terberat adalah pencabutan izin perusahaan. Pihak BBA Padang dan pihak KJPP terikat dalam suatu perjanjian kerjasama yang didalamnya terdapat kewajiban dan hak masing-masing pihak. Apabila pihak KJPP tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak BBA Padang bisa meminta pertanggung jawaban dari pihak KJPP.

B. Saran

Berdasar hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Peranan dari pihak KJPP dalam perkreditan sebaiknya lebih diperbesar lagi, tidak hanya sebagai pemberi bahan pertimbangan dasar untuk suatu nilai jaminan saja dan harus tetap didampingi oleh pihak BBA Padang untuk mengurangi potensi kesalahan.

2. Pihak BBA Padang dalam memberikan penugasan kepada KJPP hendaknya memberikan data dan informasi yang lengkap sehingga bisa mengurangi kesalahan dalam penilaian oleh KJPP, sehingga mengurangi potensi timbulnya masalah.

